

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Pendekatan *Value For Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Marsifa*, Arifuddin Mas'ud, Nitri Mirosea

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: sifaailasam86@gmail.com*, desi_sia@yahoo.co.id, nitri.mirosea@uho.ac.id

Keywords:

accountability; public sector accounting; regional financial performance; Value for Money; expenditure management

Abstract

The primary goal of public sector accounting is to improve the transparency and responsibility of regional budget management through the use of performance-based financial metrics. The purpose of this research is to examine the East Kolaka Regency Government's fiscal performance from 2020 to 2024 using the Value for Money lens. Secondary data is sourced from the Budget Realization Reports and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and used in a descriptive quantitative way. To assess the efficacy of budget management and the attainment of regional revenues, financial performance is evaluated using efficiency, effectiveness, and economic ratios, complemented by the analysis of regional financial independence and intergovernmental transfer dependency ratios. The results show that regional financial performance fluctuated across the study period. The economic and effectiveness dimensions generally indicated acceptable performance, reflecting the government's ability to control expenditures and achieve revenue targets in certain fiscal years. However, the efficiency dimension revealed persistent weaknesses, as regional expenditure frequently exceeded realized regional revenue, indicating limited efficiency in public fund utilization. These findings demonstrate that regional financial management has not fully met Value for Money principles. This research is a valuable addition to the public sector accounting literature since it offers a thorough review of the financial performance of local governments and offers practical implications for improving budget planning, expenditure control, and accountability in regional governments.

Kata Kunci:

akuntabilitas; akuntansi sektor publik; kinerja keuangan daerah; Nilai untuk uang; Manajemen pengeluaran

Abstrak

Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah melalui penggunaan metrik keuangan berbasis kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja fiskal Pemkab Kolaka Timur dari tahun 2020 hingga 2024 dengan menggunakan lensa *Value for Money*. Data sekunder bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan secara deskriptif kuantitatif. Untuk menilai kemandirian pengelolaan anggaran dan pencapaian pendapatan daerah, kinerja keuangan dievaluasi dengan menggunakan efisiensi, efektivitas, dan rasio ekonomi, dilengkapi dengan analisis kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan transfer antarpemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan regional berfluktuasi sepanjang periode penelitian. Dimensi ekonomi dan efektivitas umumnya menunjukkan kinerja yang dapat diterima, mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran dan mencapai target pendapatan pada tahun fiskal tertentu. Namun, dimensi efisiensi mengungkapkan

kelemahan yang terus-menerus, karena belanja daerah sering melebihi penerimaan daerah yang direalisasikan, mengindikasikan efisiensi yang terbatas dalam pemanfaatan dana publik. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Value for Money*. Penelitian ini merupakan tambahan yang berharga untuk literatur akuntansi sektor publik karena menawarkan tinjauan menyeluruh tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan menawarkan implikasi praktis untuk meningkatkan perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan akuntabilitas di pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik di Indonesia mendorong penerapan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja. Guna memastikan bahwasanya setiap rupiah anggaran dipergunakan bagi kepentingan publik, pendekatan ini menekankan pada bagaimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja saling bergantung (Abdullah et al: 2024). Dalam hal pengelolaan dana publik, salah satu cara yang paling populer dalam mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah ialah dengan melihat *Value for Money*. Ekonomi, efisiensi, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran adalah tiga hal utama yang ditekankan dalam metode ini (Anita et al., 2025). Sejauh mana pemerintahnya bisa memperoleh input dengan harga yang wajar, mengelolanya secara efektif, serta menghasilkan output serta hasil yang konsisten dengan sasaran yang sudah ditentukannya, inilah yang diperlihatkan oleh metode *Value for Money* (Mardiasmo, 2021).

Salah satu cara krusial dalam mengukur efektivitasnya pemerintahan daerah ialah dengan melihat seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya. Anggaran yang dikelola dengan baik memperlihatkan bahwasanya pemerintah mampu mengelola uangnya dengan baik, serta ini sangat krusial dalam pembangunan daerahnya (Triyassari & Sambharakreshna, 2024). Pengukuran kinerja keuangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari sisi realisasi anggaran, tetapi perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan yang mampu menilai kualitas pengelolaan anggaran. Pendekatan *Value for Money* dinilai mampu memberikan gambaran tersebut secara komprehensif (Mardiasmo, 2021).

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, namun dana yang tersedia bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terbatas. Mengingat faktor-faktor ini, sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan fiskal yang bijaksana dalam mencapai sasaran pembangunannya (Mardiasmo, 2021). Tidak banyak yang diketahui mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara keseluruhannya dalam hal studi yang menggunakan metode *Value for Money*. Namun demikian, guna mengevaluasi tingkat pengelolaan keuangan daerah secara obyektif serta terukur, studi ini sangat krusial. Guna mengevaluasi strategi anggaran serta meningkatkan akuntabilitasnya pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah bisa mengambil manfaat dari evaluasi kinerja keuangannya berbasis *Value for Money* (Triyassari & Sambharakreshna, 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisa *Value for Money* pada pemerintah daerahnya bisa mengungkap tingkat pemborosan anggaran, inefisiensi belanja, serta ketidaktepatan sasaran program pemerintah (Putri & Haryanto, 2021). Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan

daerah. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah (Abdullah et al., 2024).

Meskipun penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berbasis *Value for Money* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara deskriptif tanpa mengaitkannya dengan kondisi kapasitas fiskal daerah, seperti tingkat kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada tingkat pencapaian rasio keuangan semata, sehingga belum mampu menjelaskan secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu dilakukan pada pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif lebih baik, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi daerah otonom yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan pendekatan *Value for Money* pada pemerintah daerah dengan struktur APBD yang masih didominasi oleh dana transfer dan belanja rutin masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik fiskal daerah sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang fiskal bagi pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui pengukuran rasio keuangan, tetapi juga perlu dikaitkan dengan struktur pendapatan daerah, komposisi belanja daerah, dan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik fiskal yang menarik untuk dikaji karena tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif rendah dibandingkan dana transfer pusat. Selain itu, struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional dan belanja pegawai menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang efisien dan produktif. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kolaka Timur relevan untuk dianalisis dalam perspektif *Value for Money* guna menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kinerja keuangan daerah berbasis pendekatan *Value for Money* yang tidak hanya berfokus pada pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi struktural fiskal daerah melalui analisis rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan transfer, khususnya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat, komposisi belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah otonom. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian *Value for Money* pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan APBD, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berbagai studi membuktikan bahwa pendekatan ini mampu menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah secara komprehensif (Fadillah & Tanjung, 2022). Oleh karenanya, sebagian besarnya studi masih terfokus pada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal relatif kuat, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi daerah dengan keterbatasan fiskal.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan analisis *Value for Money* secara normatif dan deskriptif, tanpa mengaitkan hasil pengukuran kinerja keuangan dengan karakteristik struktural daerah, seperti tingkat kemandirian fiskal serta ketergantungannya terhadap dana transfer pusat. Situasi ini menyebabkan hasil studi belum mampu menjelaskan secara mendalam kualitas belanja daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah otonom (Pratama et al., 2022).

Riset yang meneliti kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui lensa *Value for Money* masih sangat kurang. Guna mendukung pertumbuhan daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur harus mengelola anggarannya secara ekonomis, efisien, serta efektif, yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat daerah ini ialah daerah otonom dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah (Abdullah et al., 2021).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisa kinerja keuangan daerahnya berbasis *Value for Money* yang difokuskan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan mempertimbangkan konteks fiskal daerah dan tuntutan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* yang meliputi pengukuran rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, serta didukung oleh analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan dana transfer, guna menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian empiris terkait *Value for Money* pada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, tetapi juga memberikan implikasi praktis sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Dengan menerapkan kerangka kerja *Value for Money*, penelitian deskriptif kuantitatif ini mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Dalam melaksanakan analisa, rasio ekonomi, efisiensi, serta efektivitas dihitung dengan memanfaatkan data keuangan daerahnya. Selain itu penulis juga menambahkan dua rasio pendukung yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan dana transfer. Seluruh catatan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berkaitan dengan administrasi APBD menjadi populasi dalam studi ini. Informasi mengenai rencana pengeluaran daerahnya serta realisasi pengeluaran, serta target pendapatan daerah serta realisasi pendapatan, merupakan bagian dari populasi ini serta bisa ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Alasan utama pemilihan populasi studi ini ialah dikarenakan data APBD merupakan sumber utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menerapkan metode *Value for*

Money. Metode ini sangat berguna dalam mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, serta ekonominya pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang mencakup tahun anggaran 2020-2024 dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menjadi sampel yang dipakai dalam studi ini. Catatan resmi dari pemerintah daerah menyediakan data yang dipakai dalam sampel, yang mencakup target pendapatan, realisasi pendapatan, anggaran belanja, dan realisasi belanja. Dalam menganalisa semua data keuangan yang dapat diakses selama periode riset, pendekatan pengambilan sampel yang diterapkan ialah sampling jenuh (sensus). Guna memperoleh gambaran yang lengkap serta akurat mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan metode *Value for Money*, maka diterapkan metode pengambilan sampel yang ketat.

Dalam analisa ini, kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai satu-satunya variabel independen. Tiga metrik ekonomi, efisiensi, serta efektivitas membentuk metode *Value for Money* yang dipergunakan dalam mengukur variabel ini. Dengan menerapkan metrik-metrik ini, penulis berharap bisa memberikan gambaran yang utuh mengenai seberapa baik pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam mengelola keuangannya. Studi ini menerapkan metode dokumentasi sebagai pendekatan pengumpulan data. Data yang dipergunakan dalam menghitung rasio ekonomi, efisiensi, serta efektivitasnya dalam pendekatan *Value for Money* diperoleh dari sumber sekunder, khususnya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, seperti APBD serta Laporan Pelaksanaan Anggaran.

Analisa deskriptif kuantitatif *Value for Money* dipergunakan dalam menganalisa data dalam studi ini. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, serta ekonomi merupakan pilar yang mendasari evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Menghimpun data sekunder dari APBD serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama periode riset ialah langkah pertama dalam prosedur analisa data. Rasio ekonomi, rasio efisiensi, serta rasio efektivitas dihitung dengan memanfaatkan data tersebut konsisten dengan metodologi *Value for Money*. Rasio ekonomi mengukur tingkat penghematan pengeluaran dengan membandingkan pengeluaran dengan alokasi dalam anggaran. Guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan belanja pemerintah daerah, rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan pengeluaran riil dengan penerimaan aktual. Pada saat yang sama, dalam menentukan seberapa baik target pendapatan daerah sudah tercapai, rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan pendapatan aktual dengan target pendapatannya. Hasil perhitungan masing-masing rasio selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan interpretasi ini, penulis bisa mengetahui seberapa baik serta ekonomis pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka. Selain itu, tabel serta narasi deskriptif dipergunakan dalam memaparkan temuan analisa, yang membantu dalam memahami serta menarik kesimpulannya dari studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam menyediakan layanan publik serta mendorong pertumbuhan, salah satu ukuran yang krusialnya ialah seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. APBD ialah cerminan dari pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur. APBD disusun serta diimplementasikan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta sumber-sumber lain yang sah. Tabel di bawah ini memperlihatkan

pendapatan serta pengeluaran yang diperkirakan akan diterima serta dibelanjakan oleh Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2020 – 2024**

URAIAN	2020 (dalam Milyar Rupiah)		2021 (dalam Milyar Rupiah)		2022 (dalam Milyar Rupiah)		2023 (dalam Milyar Rupiah)		2024 (dalam Milyar Rupiah)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	22,20	25,30	25,34	25,96	25,75	19,49	26,00	23,91	30,54	42,52
Dana Perimbangan	749,58	660,98	658,70	680,23	625,94	652,04	682,31	675,51	736,79	811,76
Pendapatan Lainnya	34,11	39,32	40,59	44,80	32,72	31,82	57,38	54,01	63,07	22,70
PENDAPATAN	805,89	725,60	724,64	750,98	684,41	703,34	765,69	753,43	830,40	876,99
Belanja Pegawai	227,16	182,03	207,95	196,62	222,77	229,00	269,79	210,20	277,37	292,04
Belanja Operasi	190,90	170,29	165,79	167,85	196,88	218,37	216,67	242,33	283,98	288,69
Belanja Modal	197,16	157,19	186,49	170,65	152,78	136,96	161,12	125,77	137,71	129,70
Belanja Lainnya	196,17	211,07	171,40	152,46	169,64	178,50	195,28	176,14	194,36	191,09
BELANJA	811,39	720,59	731,64	687,58	742,07	762,83	842,87	754,44	893,41	901,52

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Tabel 1 memperlihatkan bahwasanya pendapatan serta pengeluaran aktual Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam periode 2020-2024 memperlihatkan tren yang berubah-ubah, dengan lintasan yang semakin meningkat hingga akhir periode pengamatan. Pajak yang terkumpul di tingkat daerah meningkat dari Rp 725,60 miliar pada tahun 2020 menuju Rp 876,99 miliar pada tahun 2024. Dengan bantuan dana bagi hasil serta PAD, kapasitas fiskal daerah meningkat pada tahun 2024, yang merupakan tahun dengan kenaikan terbesarnya.

PAD menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp42,52 miliar, melampaui target anggaran sebesar Rp30,54 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Sementara itu, dana perimbangan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, dengan realisasi mencapai Rp811,76 miliar pada tahun 2024, ini memperlihatkan berapa banyak uang yang dibelanjakan pemerintah pusat untuk negara bagian serta daerahnya.

Pengeluaran daerah juga mengalami peningkatan, dari Rp720,59 miliar di tahun 2020 menjadi Rp901,52 miliar di tahun 2024. Sebagian besar anggaran daerah masih diperuntukkan bagi pengeluaran rutin, dikarenakan biaya pegawai dan operasional mengalami peningkatan terbesar. Pengeluaran di wilayah ini juga mengalami peningkatan, mulai dari Rp720,59 miliar di tahun 2020 menjadi Rp901,52 miliar di tahun 2024. Sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan dalam pengeluaran rutinya, dikarenakan biaya pegawai dan operasional mengalami kenaikan tertinggi. Sebaliknya, belanja modal cenderung mengalami fluktuasi dan

relatif lebih rendah dibandingkan belanja lainnya, yang menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur masih terbatas.

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja, pada tahun 2020 hingga 2023 realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan, yang menunjukkan adanya pengendalian belanja yang relatif baik. Namun, pada tahun 2024 realisasi belanja (Rp901,52 miliar) sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan (Rp876,99 miliar), yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap keseimbangan fiskal daerah pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah mampu meningkatkan realisasi pendapatan daerah dan mengendalikan belanja dalam beberapa tahun tertentu. Namun demikian, peningkatan belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan pada tahun terakhir pengamatan menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan anggaran daerah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya berdasarkan prinsip *Value for Money*, terlebih khusus pada aspek efisiensi serta efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan.

Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Pendekatan *Value for Money* **Analisis Rasio Ekonomi**

(Realisasi Belanja / Anggaran Belanja $\times$ 100%)

Tabel 2. Rasio Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2020	88,81%	Ekonomis
2021	93,98%	Ekonomis
2022	102,80%	Tidak Ekonomis
2023	89,51%	Ekonomis
2024	100,91%	Tidak Ekonomis

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang disahkan, rasio ekonomi mengindikasikan seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya. Hasil estimasi mengungkapkan bahwasanya rasio ekonominya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur akan memperlihatkan kecenderungan yang bervariasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ekonominya mencapai 88,81%, yang berarti pengeluaran berada di bawah jumlah yang dianggarkan. Hal ini berarti pemerintah daerah menghemat 11,19 persen dari anggaran pada tahun tersebut, yang dianggap sebagai pengelolaan belanja yang relatif ekonomis. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021, dimana rasio ekonomi bernilai 93,98%, yang memperlihatkan bahwasanya pemerintah masih bisa mengendalikan pengeluaran serta memanfaatkan uang yang ada dengan baik.

Namun demikian, pengeluaran riil melampaui anggaran yang disahkan pada tahun 2022, dikarenakan rasio ekonominya mengalami peningkatan menjadi 102,80%. Pengeluaran melampaui anggaran yang ditetapkan sejumlah 2,80%, mengindikasikan pengelolaan anggaran yang kurang ekonomis pada tahun tersebut. Pemerintah daerah mampu merebut kembali kendali atas pengeluaran serta mengelola anggaran secara lebih efektif pada tahun 2023, dikarenakan rasio ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi 89,51%.

Selain itu, rasio ekonominya mengalami peningkatan menjadi 100,91% pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwasanya realisasi pengeluaran lebih besar daripada anggaran yang disahkan, sehingga tergolong tidak ekonomis. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan belanja daerah yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan pengendalian anggaran yang optimal.

Secara keseluruhan, rasio ekonomi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah pada sebagian besar tahun telah dilakukan secara ekonomis, khususnya pada tahun 2020, 2021, serta 2023. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2024 terjadi kondisi tidak ekonomis yang menunjukkan adanya peningkatan realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah daerah masih harus menempuh jalan panjang dalam hal pengelolaan anggaran serta perencanaan pengeluaran sebelum mereka bisa memanfaatkan uang mereka dengan lebih baik konsisten dengan konsep *Value for Money*.

Analisis Rasio Efisiensi

(Realisasi Belanja / Realisasi Pendapatan $\times$ 100%)

Tabel 3. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2020	99,31%	Efisien
2021	91,56%	Efisien
2022	108,46%	Tidak Efisien
2023	100,13%	Tidak Efisien
2024	102,80%	Tidak Efisien

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengendalikan belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama periode 2020–2024 memperlihatkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio efisiensi senilai 99,31%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tergolong efisien meskipun berada pada batas efisiensi. Pada tahun 2021, rasio efisiensi menurun menjadi 91,54%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah karena belanja yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diperoleh.

Namun demikian, pada tahun 2022 rasio efisiensi meningkat menjadi 108,46%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tahun tersebut tergolong tidak efisien karena penggunaan anggaran lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah. Situasi ini masih belum efisien, dikarenakan realisasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan pada tahun 2023, serta rasio efisiensi naik lagi menjadi 100,13%.

Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio efisiensi tercatat sebesar 102,80%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja kembali melebihi realisasi pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, rasio efisiensi Pemerintah

Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efisien dan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam pengendalian belanja agar sejalan dengan kemampuan pendapatan daerahnya.

Analisis Rasio Efektivitas

(Realisasi Pendapatan / Anggaran Pendapatan $\times$ 100%)

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	90,04%	Tidak Efektif
2021	103,63%	Efektif
2022	102,77%	Efektif
2023	98,40%	Kurang Efektif
2024	105,61%	Efektif

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Guna menentukan apakah pemerintah daerah bisa memenuhi target pendapatannya yang dituangkan dalam APBD, bisa dilihat dari rasio efektivitasnya. Dari tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mempunyai rasio efektivitas yang cukup baik, selaras dengan perkiraan. Pada tahun 2020, rasio efektivitasnya tercatat sebesar 90,04%, yang berarti bahwasanya realisasi pendapatan cukup efektif tetapi masih jauh dari target anggaran. Dengan rasio efektivitasnya senilai 103,63% pada tahun 2021, pengelolaan pendapatan daerah cukup berhasil pada tahun tersebut, dikarenakan realisasi pendapatan lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dengan nilai 102,77% pada tahun 2022, rasio efisiensinya mempertahankan kinerjanya yang kuat, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan tingkat efektivitas dalam merealisasikan pendapatan. Namun, pada tahun 2023 rasio efektivitas sedikit menurun menjadi 98,40%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih sedikit di bawah target yang ditetapkan, meskipun masih tergolong efektif.

Selain itu, rasio efektivitas melonjak hingga 105,61% pada tahun 2024, yang berarti pemerintah daerah sudah melampaui target pendapatannya. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah daerah semakin baik dalam memanfaatkan uang yang dimilikinya. Secara umum, rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Tampaknya pemerintah daerah mempunyai sejarah yang kuat dalam mencapai target pendapatannya. Dengan demikian, dari aspek efektivitas, pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip Value for Money, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(PAD / Transfer Pemerintah+Bantuan+Pinjaman x 100%)

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
2020	3,61%	Sangat Rendah
2021	3,58%	Sangat Rendah
2022	2,85%	Sangat Rendah
2023	3,28%	Sangat Rendah
2024	5,10%	Sangat Rendah

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama periode 2020–2024 memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari nilai rasio yang seluruhnya masih berada di bawah 25%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Apabila dianalisis berdasarkan pola hubungan kemandirian keuangan daerah, yaitu pola instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif, maka kondisi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur selama periode penelitian berada pada pola hubungan instruktif. Pola ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam struktur pendanaan daerah, sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Dengan demikian, pemerintah daerah belum memiliki keleluasaan fiskal yang memadai dalam membiayai sebagian besar kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Secara tren, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2022 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan melemahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan transfer daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa peningkatan pendapatan daerah pada periode tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya dana transfer pemerintah pusat dibandingkan peningkatan kemampuan fiskal daerah secara mandiri. Sementara itu, pada tahun 2024 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya realisasi PAD daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk menggeser pola hubungan kemandirian dari instruktif ke tingkat yang lebih tinggi seperti konsultatif.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah secara mandiri. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menyebabkan fleksibilitas fiskal daerah menjadi relatif terbatas, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber-sumber PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Analisis Rasio Ketergantungan Dana Transfer

(Pendapatan Transfer / Total Pendapatan Daerah x 100%)

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Dana Transfer Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Ketergantungan Dana Transfer	Kriteria
2020	91,09%	Sangat Tinggi
2021	90,58%	Sangat Tinggi
2022	92,71%	Sangat Tinggi
2023	89,66%	Sangat Tinggi
2024	92,56%	Sangat Tinggi

Sumber: Data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (diolah, 2026)

Hasil perhitungan rasio ketergantungan dana transfer, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama periode 2020–2024 memiliki tingkat ketergantungan yang tergolong sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari nilai rasio yang seluruhnya berada di atas 89%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya rasio ketergantungan transfer mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih relatif terbatas.

Rasio ketergantungan dana transfer mengalami fluktuasi selama periode penelitian, namun tetap berada pada kategori sangat tinggi. Pada tahun 2022 dan 2024 rasio ketergantungan transfer mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan total pendapatan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan transfer dibandingkan peningkatan PAD daerah. Sementara itu, pada tahun 2023 rasio ketergantungan transfer sedikit mengalami penurunan, namun nilainya masih menunjukkan dominasi yang sangat besar dari dana transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa fleksibilitas fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih relatif terbatas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri karena sebagian besar sumber pembiayaan masih bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Selain itu, ketergantungan fiskal yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko fiskal daerah apabila terjadi perubahan kebijakan transfer atau penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat.

Studi ini menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif berdasarkan pendekatan *Value for Money*. Secara umum, aspek ekonomi dan efektivitas telah menunjukkan kinerja yang relatif baik, namun aspek efisiensi masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan

keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kemampuan dalam mengendalikan realisasi belanja dan mencapai target pendapatan pada beberapa periode tertentu, tetapi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencapai target pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Ditinjau dari aspek ekonomi, rasio ekonomi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada sebagian besar tahun pengamatan berada pada kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif mampu mengendalikan realisasi belanja agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya penghematan dan pengendalian biaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2024 rasio ekonomi berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja telah melampaui anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian anggaran belum sepenuhnya optimal, terutama pada saat terjadi peningkatan kebutuhan belanja daerah. Peningkatan realisasi belanja yang melampaui anggaran dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan belanja operasional pemerintah daerah, penyesuaian program pembangunan, maupun tekanan fiskal akibat meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.

Berdasarkan struktur belanja daerah, peningkatan belanja pegawai dan belanja operasional selama periode pengamatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Data penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai dan belanja operasi masih mendominasi struktur APBD Kabupaten Kolaka Timur dibandingkan belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran daerah masih lebih berorientasi pada belanja rutin dibandingkan belanja produktif yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Rendahnya proporsi belanja modal dapat mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun pengelolaan belanja daerah pada beberapa tahun telah tergolong ekonomis, kualitas pengalokasian belanja masih perlu ditingkatkan agar lebih mendukung pembangunan daerah yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan daerah secara efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2022 hingga 2024 berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pendapatan yang memadai. Ketidakefisienan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam mengelola anggaran daerah secara optimal. Tingginya rasio efisiensi pada beberapa tahun pengamatan memperlihatkan bahwa pemerintah daerah cenderung mengeluarkan belanja dalam jumlah yang relatif besar untuk memperoleh pendapatan daerah yang tersedia.

Kondisi efisiensi yang belum optimal tersebut diduga dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terhadap dana transfer pusat. Berdasarkan hasil penelitian, dana perimbangan masih menjadi kontributor terbesar terhadap

total pendapatan daerah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Ketergantungan terhadap transfer pusat menyebabkan kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan besaran alokasi transfer yang diterima setiap tahun. Selain itu, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan produktif.

Selain dipengaruhi oleh struktur pendapatan daerah, kondisi tidak efisien juga berkaitan dengan dominasi belanja operasional dan belanja pegawai yang terus mengalami peningkatan selama periode penelitian. Peningkatan belanja rutin yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah dapat mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dan investasi publik. Apabila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, maka ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah akan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian belanja secara lebih optimal, khususnya terhadap belanja yang bersifat konsumtif, serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar pengeluaran daerah lebih berorientasi pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, dari aspek efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan kondisi yang relatif baik. Rasio efektivitas pada tahun 2021, 2022, dan 2024 berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target pendapatan daerah. Peningkatan efektivitas pendapatan pada tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi PAD yang melampaui target anggaran. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber pendapatan lainnya.

Meskipun demikian, tingginya tingkat efektivitas pendapatan belum sepenuhnya menunjukkan tingginya tingkat kemandirian fiskal daerah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pusat. Dengan demikian, efektivitas pendapatan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Peningkatan kemandirian fiskal menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan fiskal di masa mendatang.

Selain dianalisis melalui pendekatan *Value for Money*, kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga dapat dilihat melalui rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan dana transfer. Kedua rasio tersebut digunakan sebagai indikator pendukung untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal daerah, khususnya terkait kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2020–2024, Pemerintah

Kabupaten Kolaka Timur memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari nilai rasio yang masih berada di bawah 25% pada seluruh tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer masih relatif kecil sehingga kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat.

Secara tren, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Penurunan rasio pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan transfer mengalami pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, peningkatan rasio pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Namun demikian, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah tingkat kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, hasil perhitungan rasio ketergantungan dana transfer menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari nilai rasio yang seluruhnya berada di atas 89% selama periode 2020–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari pendapatan transfer dibandingkan PAD. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih relatif terbatas dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri.

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer juga berkaitan dengan hasil analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketika sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah cenderung memiliki keterbatasan dalam menciptakan fleksibilitas fiskal dan pengelolaan anggaran yang lebih mandiri. Selain itu, dominasi belanja operasional dalam struktur APBD juga menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi relatif sempit untuk mendukung belanja produktif dan pembangunan daerah secara optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis rasio efisiensi yang menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada beberapa tahun pengamatan masih relatif tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingginya ketergantungan transfer menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih menghadapi tantangan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengendalian belanja operasional agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori New Public Management (NPM) yang menekankan pentingnya pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Dalam perspektif NPM, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan manfaat publik secara optimal melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Pendekatan *Value for Money* menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi apakah pengelolaan anggaran daerah telah memberikan nilai ekonomi, efisiensi,

dan efektivitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, khususnya dalam aspek efisiensi dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Huzaema et al. (2025), Prameswari et al. (2024), dan Erica et al. (2024) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah umumnya menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, tetapi masih menghadapi permasalahan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Jatmiko et al. (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas perencanaan anggaran. Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah mampu menerapkan sebagian prinsip *Value for Money*, khususnya pada aspek ekonomi dan efektivitas. Namun demikian, aspek efisiensi masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mengendalikan pertumbuhan belanja operasional, memperkuat pengawasan pengeluaran daerah, serta mengoptimalkan potensi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan produktif, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020–2024 dengan pendekatan *Value for Money*, disimpulkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi yang fluktuatif pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah daerah telah cukup baik menerapkan prinsip ekonomi dan efektivitas, terbukti dari realisasi belanja yang umumnya berada di bawah anggaran serta kemampuan mencapai bahkan melampaui target pendapatan pada beberapa tahun, seperti tahun 2021, 2022, dan 2024. Namun demikian, aspek efisiensi masih menjadi tantangan utama karena realisasi belanja kerap melebihi realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 hingga 2024, yang dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat (di atas 89%), dominasi belanja operasional dan belanja pegawai dalam struktur APBD, serta rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih berada pada kategori sangat rendah (di bawah 6%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas dalam mendukung pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat pengendalian belanja operasional, mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengawasan keuangan daerah agar pengelolaan APBD lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian *Value for Money* pada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan indikator ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas berbasis data keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis dengan menambahkan indikator kinerja non-keuangan, kualitas pelayanan publik, maupun analisis komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pemerintah daerah dalam perspektif Value for Money.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., Nirwana, N., & Darmawati, D. (2025). ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI MENGGUNAKAN VALUE FOR MONEY. *REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 6(1), 6–13.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur. (2021). Kabupaten Kolaka Timur dalam angka 2021. Kolaka Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur. (2025). Kabupaten Kolaka Timur dalam angka 2025. Kolaka Timur: BPS.
- Cunha, A. A. Da, Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer : Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86–100. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>
- Erica, D., Sari, M., Putri, R., & Nugroho, A. (2024). Analysis of public sector financial performance using value for money in Tangerang Regency. *International Journal of Public Sector Accounting Research*, 4(2), 115–128. <https://www.researchgate.net/publication/385395456>.
- Fadhila, N., Tanjung, J.S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (2), 126-134. Doi: <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.50>.
- Fathiyah, Iskandar N., Bambang NP., Fahmi R., & Muhammad A. (2022). Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Prajaiswara*. 3(1) 65-74 DOI:10.55351/prajaiswara.v3i1.43.
- Habibi, Utami, W.B., Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*. 3(1): 483-488, doi: <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>.
- Halim, A. (2016). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Halim, A. dan M.S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Huzaema, R., Dahlan, M., & Akbar, R. (2025). Financial performance analysis using the value for money method at BPKAD Tidore Islands City, Indonesia for 2019–2023 period. *International Journal of Public Financial Management*, 5(1), 45–59. <https://www.researchgate.net/publication/394689102>.
- Jatmiko, B., Haya, A., & Utami, W. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(3), 287–305. <https://www.researchgate.net/publication/368742809>.

- Lamato, M.T.P., Hasan, W., Rahman, Z., Bilondatu, N. (2025). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Value for Money. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMAI)*, 4(1), 38-46. doi: <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/jemai>.
- Lulu Syifa Fadhilla., Dewi Susilowati. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*. 12, 1428-1448.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mujahid, A., Darwanis & Abdullah, S. (2024). Analysis of Planning and Budget Consistency on The Quality of Government Agency Performance Accountability Reports in the Simeulue District. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 3(7), 2965-2986. doi: <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.9692>.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Pratama, V.Y., Syamsuddin, Difa, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, 1 (2), 149-155. DOI: <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>.
- Prameswari, D. A., Safitri, N., Karima, R., & Gunawan, I. (2024). Analisis kinerja keuangan sektor publik dengan pendekatan value for money di Kota Pekalongan tahun 2021–2022. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, 6(1), 23–37. <https://www.researchgate.net/publication/386991243>.
- Putri, R. A., & Haryanto. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan pendekatan value for money. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 85–98.
- Triyassari, A., Sambharakreshna, Y. (2024). Value For Money dan Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7 (2) (2024) 259-278. Doi: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index>.
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of local government financial performance in Indonesia. *Journal of Accounting and Public Governance*, 7(2), 89–104. <https://www.researchgate.net/publication/373723094>